



Kuasi Gerakan Sosial: Studi Kasus Aksi 25 Agustus 2025

Nadira Cahyaning Tias^{1*}, Firyal Nur Fadhillah², Dwi Septian Hadinugroho³, Aniqotul Ummah⁴, Teddy Chrisprimanata Putra⁵

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi: 2310413184@mahasiswa.upnvj.ac.id¹

Abstract. *This study investigates the phenomenon of quasi-social movements that emerged during the August 25, 2025 protests in Indonesia. Quasi-social movements are defined as forms of public mobilization that appear to arise spontaneously, lack formal organizational structures, and are often leveraged for particular political agendas. Using a qualitative method supported by literature review, this research examines social movement theories, the functions of social media, and the socio-political dynamics that shaped the protests. The findings indicate that the protests were not purely the result of spontaneous civic engagement, but were instead driven by top-down mobilization orchestrated by elite actors through digital narratives, disinformation, and the broader influence of communication technology. This phenomenon signals a shift in the relationship between citizens and the state, including evolving patterns of political participation that do not always follow organized forms. The protests further illustrate how mass mobilization in the digital era can be generated through narrative construction and manipulation of public perception. In conclusion, quasi-social movements represent a new pattern of technology-mediated political expression, highlighting the need for more critical perspectives on modern forms of social mobilization.*

Keywords: *August Protest; Mass Mobilization; Quasi-Social Movement; Social Media; Socio-Political Dynamics*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji fenomena gerakan kuasi-sosial yang muncul selama protes pada tanggal 25 Agustus 2025 di Indonesia. Gerakan kuasi-sosial didefinisikan sebagai bentuk mobilisasi publik yang tampaknya muncul secara spontan, tidak memiliki struktur organisasi formal, dan sering dimanfaatkan untuk agenda politik tertentu. Dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh tinjauan literatur, penelitian ini menganalisis teori gerakan sosial, fungsi media sosial, dan dinamika sosio-politik yang membentuk protes tersebut. Temuan menunjukkan bahwa protes tersebut bukan semata-mata hasil dari keterlibatan sipil yang spontan, melainkan didorong oleh mobilisasi top-down yang dirancang oleh aktor elit melalui narasi digital, disinformasi, dan pengaruh luas teknologi komunikasi. Fenomena ini menandakan pergeseran dalam hubungan antara warga negara dan negara, termasuk pola partisipasi politik yang terus berkembang dan tidak selalu mengikuti bentuk-bentuk terorganisir. Protes tersebut juga menggambarkan bagaimana mobilisasi massa di era digital dapat dihasilkan melalui konstruksi narasi dan manipulasi persepsi publik. Kesimpulannya, gerakan sosial kuasi mewakili pola baru ekspresi politik yang dimediasi teknologi, menyoroti kebutuhan akan pandangan kritis terhadap bentuk-bentuk mobilisasi sosial modern.

Kata kunci: Dinamika Sosial-Politik; Gerakan Sosial Kuasi; Media Sosial; Mobilisasi Massa; Protes Agustus

1. LATAR BELAKANG

Dalam dinamika politik saat ini, terdapat berbagai bentuk mobilisasi sosial yang tidak sepenuhnya dapat diklasifikasikan sebagai gerakan sosial dalam arti tradisional. Salah satu bentuk yang menarik untuk dianalisis adalah kuasi gerakan sosial, yaitu fenomena mobilisasi masyarakat yang mirip dengan gerakan sosial tetapi tidak memiliki karakteristik dasar seperti struktur organisasi yang jelas, kepemimpinan formal, atau ideologi yang konsisten (Offe, 1985). Fenomena ini menjadi penting dalam konteks masyarakat modern yang cenderung mengalami fragmentasi identitas, krisis kepercayaan terhadap institusi, serta perubahan pola partisipasi politik yang semakin fleksibel dan tidak terikat pada bentuk-bentuk konvensional.

Secara historis, gerakan sosial dipahami sebagai bentuk kolektif yang terorganisir untuk memperjuangkan perubahan sosial atau mempertahankan status quo melalui strategi, ideologi, dan kepemimpinan yang terstruktur (Tilly, 2004). Namun, seiring dengan perkembangannya, tidak semua bentuk mobilisasi sosial mengikuti pola tersebut. Munculnya kuasi gerakan sosial menunjukkan adanya bentuk mobilisasi yang bersifat spontan, situasional, dan sering kali berakar pada keresahan moral atau politik yang bersifat sementara. Fenomena ini tidak selalu berujung pada perubahan kebijakan atau pembentukan organisasi baru, melainkan berfungsi sebagai ekspresi politik simbolik masyarakat terhadap ketimpangan sosial atau ketidakpuasan terhadap negara (Melucci, 1996).

Aksi 25 Agustus 2025 menjadi contoh nyata dari fenomena kuasi gerakan sosial tersebut. Komunitas Bareng Warga menyatakan bahwa mereka tidak berpartisipasi dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) pada tanggal 25 Agustus 2025. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh salah satu admin mereka, komunitas ini "menduga terdapat potensi bahwa massa yang hadir bukanlah massa yang bersifat organik". Dengan kata lain, Bareng Warga meyakini bahwa para peserta aksi tersebut mungkin tidak muncul secara alami dari masyarakat, melainkan mungkin telah dimobilisasi atau dikelola melalui suatu mekanisme yang lebih terorganisir.

Selanjutnya, Bareng Warga juga menyatakan bahwa narasi yang berkembang di media sosial terkait dengan demonstrasi kali ini terlihat mencurigakan, mereka mencatat adanya perubahan sikap yang tiba-tiba dari akun-akun buzzer atau pendengung yang biasanya bersikap menentang demonstrasi, namun kini beralih mendukung dengan narasi seperti "bubarkan dan ratakan DPR". Komunitas ini menegaskan kekhawatirannya bahwa banyak warga awam yang "terpengaruh isu" tanpa memahami siapa yang sebenarnya berada di balik ajakan untuk melakukan aksi tersebut.

Lalu Aksi 25 Agustus 2025 ini diteliti karena peristiwa ini secara konkret mencerminkan dinamika baru dalam partisipasi politik masyarakat Indonesia. Aksi yang berlangsung pada 25 Agustus 2025 memberikan gambaran yang menarik mengenai bagaimana mobilisasi publik di era digital dapat terjadi dengan cepat dan meluas, meskipun belum tentu berakar pada gerakan yang benar-benar organik. Kecurigaan ini muncul karena pola dukungan terhadap aksi tersebut di media sosial terlihat tidak alami, terdapat akun-akun yang sebelumnya menolak gerakan protes, namun tiba-tiba mendukung narasi yang menyerang lembaga legislatif.

Dalam konteks ini, Aksi 25 Agustus 2025 menjadi contoh ideal untuk mengkaji konsep kuasi gerakan sosial, yaitu bentuk mobilisasi yang berada di antara gerakan sosial klasik dan

tindakan spontan tanpa arah politik yang jelas. Melalui studi kasus ini peneliti berusaha memahami bagaimana bentuk-bentuk ekspresi politik baru muncul di tengah kemajuan teknologi komunikasi, perubahan pola partisipasi publik, serta meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi formal seperti partai politik dan lembaga negara.

Selain itu, pemilihan kasus ini juga didasarkan pada relevansinya terhadap konteks sosial-politik Indonesia kontemporer yang sedang mengalami perubahan signifikan dalam pola partisipasi masyarakat. Aksi 25 Agustus 2025 menunjukkan reaksi emosional masyarakat terhadap suatu isu, fenomena ini memungkinkan individu dari berbagai latar belakang sosial untuk terlibat dalam aksi politik tanpa harus bergabung dalam organisasi atau kelompok ideologis tertentu. Dengan demikian, studi kasus ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menelusuri hubungan antara teknologi, ekspresi sosial, dan partisipasi politik dalam masyarakat yang semakin terfragmentasi secara identitas.

Fenomena kuasi gerakan sosial juga mencerminkan transformasi dalam hubungan antara masyarakat dan negara. Ini menandai pergeseran dari gerakan sosial yang berfokus pada perubahan struktural menuju gerakan yang lebih simbolis dan ekspresif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat modern, politik tidak hanya dijalankan melalui institusi formal, tetapi juga melalui tindakan kolektif yang bersifat sementara, tidak terlembagakan, namun memiliki resonansi sosial yang kuat. Dengan demikian, aksi 25 Agustus 2025 dapat dipahami bukan sekadar sebagai peristiwa politik, melainkan sebagai ekspresi sosial yang mencerminkan bentuk baru dari artikulasi politik masyarakat sipil di era kontemporer.

Penelitian ini menjadi penting karena kuasi gerakan sosial mengaburkan batas antara gerakan sosial dan mobilisasi spontan, antara partisipasi politik dan ekspresi sosial. Ini membuka ruang untuk memahami kembali bagaimana masyarakat harus jeli dalam melihat gerakan-gerakan non-organik yang terlihat seperti aksi kolektif, tetapi sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kajian terhadap aksi 25 Agustus 2025 tidak hanya relevan bagi studi gerakan sosial, tetapi juga bagi analisis politik kontemporer yang berfokus pada dinamika partisipasi masyarakat dalam konteks perubahan sosial dan krisis legitimasi politik.

Penelitian ini berangkat dari fenomena Aksi 25 Agustus 2025 yang merepresentasikan bentuk kuasi gerakan sosial, yakni mobilisasi kolektif masyarakat yang menyerupai gerakan sosial namun tanpa struktur, ideologi, maupun kepemimpinan formal. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: mengapa Aksi 25 Agustus 2025 dapat dikategorikan sebagai bentuk kuasi gerakan sosial dalam konteks dinamika sosial-politik Indonesia kontemporer? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dinamika dan karakteristik Aksi 25

Agustus 2025, dengan menelusuri faktor-faktor sosial dan politik yang melatarbelakangi kemunculannya. Melalui kajian ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pemahaman mengenai transformasi pola partisipasi masyarakat dan munculnya bentuk-bentuk mobilisasi baru di luar kerangka gerakan sosial konvensional.

Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa dinamika gerakan sosial tidak selalu bersifat organik dari akar rumput, melainkan dapat terbentuk melalui mobilisasi yang bersifat top-down atau kuasi. Agustina dan Marlina (2024) dalam penelitiannya mengenai Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jawa Tengah mengidentifikasi strategi gerakan KLAP (Konsep, Lobi, Aksi, Politik) sebagai bentuk mobilisasi terorganisir yang diarahkan oleh elit serikat untuk memperjuangkan kenaikan upah. Pola serupa ditemukan oleh Febriantini dan Anggrayni (2023) pada studi tentang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kabupaten Bekasi, di mana arah gerakan buruh ditentukan oleh struktur kepemimpinan yang memiliki akses terhadap arena politik dan kebijakan publik.

Dalam konteks global, Zihnioğlu dan Kourou (2022) menyoroti terbentuknya jaringan sosial anti-feminis di Turki yang beroperasi melalui hubungan erat antara masyarakat sipil dan kekuasaan politik konservatif, menunjukkan bentuk mobilisasi sosial yang dipengaruhi oleh kekuatan negara. Sousa (2021) dalam penelitiannya mengenai gerakan anti-austerity di Portugal menemukan bahwa media sosial berfungsi sebagai ruang mobilisasi semu, di mana partisipasi warga tampak horizontal namun sesungguhnya dikendalikan oleh aktor dominan dalam jaringan digital. Sementara itu, Mou, Wei, dan Huang (2023) melalui simulasi agent-based menunjukkan bahwa dinamika opini publik di media sosial cenderung dibentuk oleh pengguna inti (core users) yang berperan sebagai pengarah wacana, merepresentasikan bentuk kontrol dari atas dalam ekosistem komunikasi daring.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik gerakan sosial top-down menegaskan adanya relasi kuat antara kekuasaan dan mobilisasi massa. Gerakan sosial tidak semata-mata muncul sebagai ekspresi spontan masyarakat, melainkan sering kali merupakan hasil rekayasa strategis dari aktor atau institusi yang memiliki kepentingan politik. Temuan-temuan ini menjadi landasan konseptual bagi penelitian “Kuasi Gerakan Sosial: Studi Kasus Aksi 25 Agustus 2025,” yang berupaya menganalisis pola mobilisasi sosial yang dikendalikan oleh struktur elit dalam konteks politik kontemporer Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan Teori Framing. Menurut Goffman (dalam Siswanti, 2019) teori framing merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami bagaimana

realitas sosial dibentuk dan dikonstruksi melalui media. Dalam pandangan ini, media tidak hanya menyampaikan informasi secara netral, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan cara suatu peristiwa atau isu dipersepsikan oleh publik. Melalui penonjolan aspek-aspek tertentu dalam penyajian berita, media dapat memengaruhi cara individu memahami realitas, sehingga persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa dapat berubah sesuai dengan bingkai yang digunakan. Dalam konteks ini, framing membantu memahami bahwa pemberitaan mengenai Aksi 25 Agustus 2025 tidak semata-mata merepresentasikan fakta apa adanya, tetapi juga mencerminkan sudut pandang tertentu dari media yang dapat membentuk persepsi publik terhadap gerakan tersebut. Melalui bingkai yang dipilih, misalnya apakah aksi itu digambarkan sebagai bentuk protes masyarakat, mobilisasi elite, atau sekadar kegiatan simbolik, media berperan dalam menentukan bagaimana publik menilai legitimasi dan makna sosial dari gerakan tersebut.

Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan konsep dari kuasi gerakan yang dimana aksi kolektif yang diarahkan untuk mendorong perubahan dari dalam sistem dapat dikategorikan sebagai bentuk kuasi gerakan. Jenis gerakan ini muncul ketika terjadi konflik atas isu-isu tertentu yang memunculkan dukungan dari kelompok-kelompok yang telah memiliki posisi atau struktur dalam lembaga yang sah. Dengan memanfaatkan saluran dan mekanisme institusional yang tersedia, kelompok-kelompok tersebut mampu menekan dan memengaruhi sistem dari dalam. Secara umum, karakteristik semacam ini mencerminkan perilaku khas dari kuasi gerakan, yaitu upaya kolektif yang tidak menentang sistem secara langsung, melainkan berupaya melakukan transformasi melalui cara-cara yang diakui secara formal. Dalam menjalankan aksinya, gerakan ini lebih banyak memanfaatkan jalur atau mekanisme yang bersifat institusional, seperti lembaga formal atau prosedur resmi, untuk memberikan tekanan terhadap struktur-struktur sosial, politik, atau ekonomi yang berkaitan. Dengan cara tersebut, mereka berupaya memengaruhi kebijakan, norma, maupun praktik yang ada agar bergerak sesuai dengan arah perubahan yang diinginkan. Bentuk mobilisasi bersama yang dilakukan secara kolektif untuk menuntut perubahan sistem lewat jalur-jalur formal dan institusional dapat dipahami sebagai wujud dari gerakan kuasi (Mukherji, 1977).

Lalu konsep aksi kolektif juga di gunakan, menurut Martin (dalam Syarif & Halida, 2025) aksi kolektif dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan yang tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga emosional, karena melibatkan hati dan pikiran individu secara bersamaan. Dalam konteks ini, emosi, terutama perasaan ketidakadilan dan kemarahan, menjadi faktor penting yang mendorong seseorang untuk bertindak. Menurut pengertian tersebut, seseorang cenderung bergabung dalam aksi kolektif ketika ia menyadari posisinya yang dirugikan atau

terpinggirkan (disadvantaged) dalam suatu sistem sosial, serta merasakan dorongan emosional yang kuat, seperti kemarahan, terhadap situasi tersebut. Dengan kata lain, kesadaran akan ketimpangan sosial yang dialami, jika disertai dengan emosi yang intens, dapat menjadi pemicu utama lahirnya tindakan kolektif dalam memperjuangkan perubahan. Aksi kolektif merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang memiliki kesamaan tujuan dan kepentingan. Tindakan tersebut dapat terwujud melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas bersama atau melalui peran masing-masing anggota dalam sebuah organisasi. Tujuan utama dari aksi kolektif adalah untuk memperjuangkan kepentingan bersama yang tidak dapat dicapai secara individual (Lubis & Pandjaitan, 2024).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena kuasi gerakan sosial melalui analisis data deskriptif dan naratif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang mengandalkan narasi dan bahasa deskriptif untuk menafsirkan dan menjelaskan makna fenomena, peristiwa, dan konteks sosial tertentu (Waruwu, 2023). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan makna, proses, serta konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi munculnya Aksi 25 Agustus 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka terhadap berbagai sumber akademik seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema gerakan sosial, mobilisasi politik, dan konsep kuasi sosial movement. Tinjauan pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengkaji dan menelaah kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi maupun peneliti lain yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas (Mahanum, 2021). Proses ini melibatkan identifikasi, seleksi, dan analisis kritis terhadap literatur untuk membangun landasan teoretis yang kuat serta menelusuri celah penelitian yang ada.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menafsirkan hasil tinjauan pustaka untuk mengidentifikasi pola mobilisasi, aktor kunci, serta dinamika sosial-politik yang melatarbelakangi Aksi 25 Agustus 2025. Menurut Creswell (2014), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dan penulisan hasil penelitian, karena ketiganya merupakan bagian yang saling berkaitan dalam pengembangan studi kualitatif. Data yang diperoleh diorganisasi, disajikan, dan ditafsirkan untuk mengungkap hubungan konseptual antara teori gerakan sosial kuasi dan realitas empiris

yang terjadi, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena tersebut.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi dan Karakteristik Aksi 25 Agustus 2025

Pada tanggal 25 Agustus 2025, di depan kompleks Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), terjadi sebuah demonstrasi massa yang menarik perhatian publik karena karakter dan dinamika yang berbeda dari protes-protes yang biasanya terjadi. Menurut Abdurrahman & Ernis (2025), komunitas sipil Bareng Warga mengungkapkan kecurigaannya bahwa para peserta aksi tersebut bukanlah massa yang terbentuk secara organik, melainkan massa yang direkayasa atau dimobilisasi dengan cara yang tidak alami. Kecurigaan ini muncul karena beberapa peserta aksi tidak diketahui asal-usul organisasinya dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diangkat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa aksi ini tidak sepenuhnya muncul dari kesadaran spontan masyarakat sipil, melainkan mengandung indikasi adanya pihak-pihak yang mungkin memiliki kepentingan politik tertentu di balik mobilisasi massa.

Lebih lanjut, aksi ini memiliki karakteristik yang berbeda dari demonstrasi masyarakat sipil pada umumnya. Laporan lain dari Aswara, D., & Hamdi, I. (2025) menyebutkan bahwa sejumlah serikat buruh besar dan organisasi masyarakat yang biasanya aktif dalam gerakan protes justru menolak untuk terlibat dalam aksi ini karena tidak mengetahui siapa penggagas dan penanggung jawab utamanya. Hal ini menandakan bahwa proses pengorganisasian aksi tidak dilakukan melalui jaringan sosial yang lazim digunakan oleh gerakan rakyat, melainkan bersifat top-down atau bahkan artifisial. Dengan demikian, aksi ini menunjukkan pola mobilisasi yang lebih menyerupai *astroturfing*, yaitu upaya untuk menciptakan kesan dukungan masyarakat luas padahal gerakannya tidak benar-benar berasal dari akar rumput.

Selain itu, karakteristik lain yang mencolok dari aksi pada 25 Agustus 2025 adalah tingginya tingkat pengamanan yang diterapkan oleh aparat negara serta perhatian pemerintah terhadap kemungkinan manipulasi informasi. Dalam laporan Saputra, E. Y., & Hantoro, J. (2025) dinyatakan bahwa pemerintah meminta platform media sosial untuk menghapus konten yang diduga merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) yang berkaitan dengan aksi tersebut. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintah mengaitkan dinamika aksi dengan fenomena disinformasi digital dan propaganda berbasis teknologi. Dengan demikian, aksi ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara masyarakat dan lembaga politik, tetapi juga

menunjukkan bagaimana ranah digital kini menjadi arena baru dalam memobilisasi sekaligus memanipulasi opini publik.

Secara keseluruhan, deskripsi dan karakteristik dari aksi 25 Agustus 2025 dapat disimpulkan melalui beberapa poin utama: adanya kerumunan massa di sekitar DPR dengan tuntutan terhadap wakil rakyat, munculnya kecurigaan dari komunitas sipil mengenai keaslian massa yang hadir, tidak adanya keterlibatan resmi dari kelompok besar yang biasanya aktif dalam aksi rakyat, serta kuatnya konteks keamanan dan pengawasan media digital oleh negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa aksi tersebut tidak dapat sepenuhnya dipahami sebagai bentuk partisipasi politik yang organik, melainkan harus dilihat dalam konteks politik pasca-digital yang memungkinkan mobilisasi massa melalui rekayasa narasi dan disinformasi.

Faktor Sosial-Politik yang Memicu Kuasi Gerakan Sosial

Kemunculan Aksi 25 Agustus 2025 tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk spontanitas publik, melainkan hasil dari dinamika sosial-politik yang membuka ruang bagi mobilisasi massa yang bersifat top-down. Aksi ini menggambarkan bagaimana keresahan sosial, krisis kepercayaan terhadap institusi politik, serta dominasi narasi di media sosial dapat dimanfaatkan oleh aktor-aktor elite untuk membentuk ilusi partisipasi rakyat. Demonstrasi yang terjadi antara tanggal 25 Agustus hingga awal September 2025 merupakan bentuk reaksi masyarakat terhadap beragam persoalan sosial dan ekonomi yang muncul. Aksi tersebut dipicu oleh kebijakan kontroversial mengenai pemberian tunjangan baru bagi anggota DPR, kenaikan pajak bumi dan bangunan, serta meningkatnya rasa ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menangani persoalan kesenjangan ekonomi dan tingginya biaya hidup yang semakin membebani masyarakat (Wahyudi dalam Rafsanjani et al., 2025).

Seruan untuk melakukan aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025 pertama kali muncul melalui pesan berantai di grup WhatsApp dan berbagai platform media sosial. Ajakan ini berasal dari kelompok yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia”, yang mulai menyebarkan pesannya hampir satu minggu sebelum hari pelaksanaan. Dalam seruannya, kelompok ini mengundang berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, hingga mahasiswa untuk turun ke jalan. Mereka membawa sejumlah tuntutan, di antaranya pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo serta pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut laporan *Kompas.id*, aksi unjuk rasa yang menolak tunjangan perumahan DPR sebesar Rp50 juta per bulan digelar di sekitar Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta. Aksi tersebut berlangsung sejak Senin siang hingga malam hari, dan tidak hanya diikuti oleh mahasiswa, tetapi juga pelajar SMA, pengemudi ojek daring, serta berbagai kelompok masyarakat lainnya. Gelombang demonstrasi ini dipicu oleh ajakan

yang telah beredar di media sosial selama beberapa pekan sebelumnya, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan DPR yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat. Kekecewaan massa semakin memuncak setelah sejumlah anggota dewan menunjukkan sikap yang dinilai tidak empatik terhadap kritik publik.

Awalnya, unjuk rasa tersebut berjalan secara damai, namun situasi mulai memanas ketika aparat keamanan berupaya membubarkan massa pada siang hari. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat pun tidak dapat dihindari. Akibatnya, sejumlah kendaraan mengalami kerusakan, bahkan pos polisi turut dibakar. Berdasarkan laporan LBH Jakarta, terdapat sekitar 370 orang yang diamankan oleh Polda Metro Jaya, sebagian besar di antaranya merupakan pelajar tingkat SMA/SMK atau anak di bawah umur. Pihak kepolisian menyayangkan aksi tersebut berujung ricuh, dan menilai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Menanggapi fenomena ini, A. Bakir Ihsan, dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyebut bahwa aksi tersebut mencerminkan akumulasi kemarahan publik terhadap DPR yang dinilai abai terhadap aspirasi rakyat. Menurutnya, para wakil rakyat seharusnya mampu membaca kritik masyarakat melalui berbagai kanal media, tanpa harus menunggu munculnya gelombang demonstrasi di jalan. Ia menekankan bahwa DPR semestinya melakukan refleksi diri (becermin) terhadap kinerjanya yang stagnan, terlebih ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi.

Namun, menurut laporan dari *Tempo.co*, di sisi lain, komunitas “Bareng Warga” yang selama ini dikenal aktif mendukung gerakan masyarakat sipil dan memperjuangkan isu keadilan sosial menyatakan tidak ikut terlibat dalam aksi 25 Agustus tersebut. Melalui pernyataannya di media sosial X (Twitter), komunitas ini menegaskan bahwa mereka tidak memberikan dukungan atau endorsement terhadap gerakan tersebut karena menilai adanya kejanggalan dan potensi ketidakorganikan massa. Salah satu admin dari Bareng Warga mengungkapkan bahwa setelah melakukan penelusuran internal, mereka menemukan adanya narasi yang mencurigakan di media sosial terkait ajakan demonstrasi ini. Kecurigaan tersebut muncul karena sejumlah akun buzzer yang biasanya bersikap kontra terhadap aksi-aksi protes masyarakat justru tiba-tiba mendukung narasi “bubarkan dan ratakan DPR”. Kondisi ini membuat Bareng Warga khawatir bahwa banyak masyarakat awam dapat terjebak dalam propaganda yang tidak sepenuhnya murni berasal dari gerakan rakyat. Mereka menduga bahwa narasi pembubaran DPR tersebut bersifat top-down dan dapat digunakan sebagai legitimasi untuk melemahkan lembaga legislatif, bukan untuk memperkuat demokrasi.

Selain itu, Bareng Warga juga menyoroti ketidakjelasan identitas penggerak utama aksi ini. Berdasarkan komunikasi mereka dengan jaringan aktivis di berbagai daerah, hampir tidak ada kelompok konsolidasi yang biasa terlibat dalam aksi-aksi sosial yang ikut turun ke jalan pada hari tersebut. Hanya di Yogyakarta, ditemukan bahwa sebagian massa bergerak secara organik dan mandiri. Selebihnya, mobilisasi massa di kota lain tampak tidak memiliki arah yang jelas dan tidak berasal dari jaringan gerakan sosial yang biasa beroperasi di lapangan. Hingga kini, siapa sebenarnya pencetus utama demonstrasi 25 Agustus masih belum diketahui secara pasti. Di media sosial, nama “Revolusi Rakyat Indonesia” tetap menjadi pengusung narasi utama, menyerukan masyarakat untuk bangkit melawan ketidakadilan. Namun, dengan adanya berbagai indikasi bahwa aksi tersebut tidak sepenuhnya lahir dari gerakan rakyat organik, muncul pertanyaan besar tentang sejauh mana aksi itu benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, atau justru merupakan gerakan rekayasa politik yang memanfaatkan ketidakpuasan publik untuk kepentingan tertentu.

Dampak dan Implikasi Kuasi Gerakan Sosial

Masyarakat jadi semakin sadar bahwa keberadaan tunjangan besar bagi para anggota DPR ini jumlahnya sangat timpang dengan UMR di Jakarta. Masyarakat menjadi semakin sadar bahwa keberadaan tunjangan besar bagi para anggota DPR ini sangat timpang dengan upah minimum regional (UMR) di Indonesia terutama di Jakarta. Ketimpangan inilah yang menimbulkan pandangan bahwa wakil rakyat hidup dalam keuntungan ekonomi yang jauh dari kehidupan realitas masyarakat pekerja. Menurut laporan tahun 2025 dari *Center for Strategic & International Studies (CSIS)*, demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 25 Agustus 2025 awalnya muncul sebagai reaksi terhadap usulan kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPR. Namun, protes tersebut berkembang menjadi ekspresi ketidakpuasan publik yang lebih luas terhadap situasi ekonomi dan sosial yang semakin memburuk di Indonesia. Karena ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan dan ekonomi dapat menghambat mobilitas sosial dan ekonomi, ketimpangan sosial dapat menjadi penyebab utama kemiskinan (Watif et al., 2024). Ketidakpastian ekonomi yang meningkat di kalangan masyarakat miskin perkotaan, penduduk pedesaan, dan kelas menengah memperkuat persepsi mengenai ketidakpedulian pemerintah yang memperkuat keyakinan bahwa elit politik telah menjadi acuh tak acuh terhadap keadilan sosial. Akibatnya, demonstrasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap keputusan ekonomi yang tidak adil, tetapi juga sebagai pembangkit kesadaran kolektif terhadap ketidaksetaraan struktural antara mereka yang berkuasa dan warga biasa dinamika yang mendasari pembentukan gerakan sosial kuasi di Indonesia.

Generasi muda dan pekerja sektor informal termasuk di antara kelompok yang paling frustrasi, merasa semakin terpinggirkan oleh kebijakan ekonomi pemerintah. Banyak dari mereka menganggap klaim pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi yang stabil tidak relevan dengan perjuangan sehari-hari kelas bawah dan menengah. Menurut *East Asia Forum* (2025), jumlah orang Indonesia yang mengalami penurunan mobilitas sosial semakin meningkat terutama kalangan muda, yang pernah menjadi basis pemilih utama kemenangan Presiden Prabowo pada pemilu 2024. Perubahan ini mencerminkan transformasi dari dukungan politik menjadi kekecewaan sosial, yang pada akhirnya mendorong partisipasi aktif mereka dalam demonstrasi 25 Agustus 2025. Namun, dinamika sosial ini tidak menghasilkan respons yang seragam. Sementara sebagian kalangan masyarakat memandang demonstrasi sebagai ekspresi perlawanan yang sah terhadap ketidaksetaraan struktural dan kebijakan ekonomi yang tidak ramah terhadap rakyat, tetapi ada yang khawatir bahwa tindakan semacam itu dapat memicu kerusuhan, merusak fasilitas publik, dan semakin mengganggu stabilitas ekonomi. Pada dasarnya, demonstrasi 25 Agustus 2025 mencerminkan ketegangan antara aspirasi transformasi sosial dan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi sebuah ciri khas gerakan sosial kuasi di Indonesia kontemporer.

Menurut Jaffrey dalam *Carnegie Endowment for International Peace* (2025), sistem demokrasi Indonesia menunjukkan pola pembagian kekuasaan yang ditandai oleh aliansi di antara elit politik, ekonomi, dan sosial. Dinamika ini sering kali menghasilkan hubungan persekongkolan yang menghilangkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan elit sehingga berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan pemimpin politik. Contoh nyata tekanan publik terhadap elit dapat dilihat dalam revisi kebijakan tunjangan bagi anggota DPR dari lebih dari 100 juta rupiah menjadi sekitar 65 juta rupiah per bulan. Dikutip dari laporan *Reuters* oleh Sulaiman dan Suroyo (2025), keputusan untuk memangkas tunjangan tersebut merupakan respons langsung Presiden Prabowo bersama partai politik terhadap gelombang protes besar yang menewaskan sejumlah warga. Namun, banyak kalangan menilai perubahan ini masih bersifat simbolis karena tidak menyentuh akar persoalan yang lebih mendalam, yaitu kesenjangan ekonomi, dominasi oligarki politik, dan sistem pemerintahan yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini lebih mencerminkan pencapaian simbolik politik daripada reformasi struktural yang substansial, sekaligus memperkuat pandangan bahwa kuasi gerakan sosial di Indonesia masih beroperasi dalam batas-batas yang dikendalikan oleh elite kekuasaan namun tetap berpotensi berkembang menjadi bentuk perlawanan yang lebih terorganisir di masa depan.

Karena gerakan ini berasal dari masalah struktural yang mendalam seperti ketidaksetaraan ekonomi dan krisis representasi politik, gerakan ini memiliki potensi untuk membawa perubahan jangka menengah dan panjang mulai dari reformasi legislatif hingga partisipasi pemuda yang lebih besar sebagai aktor politik yang menjanjikan. Menurut Riswanda (2025) dalam *Inside Indonesia*, demonstrasi yang meluas di berbagai kota Indonesia pada tahun 2025 melambangkan kekecewaan publik terhadap pemerintah yang tidak responsif dan berfungsi sebagai “*loud alarm*” akan kerentanan demokrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa protes pada 25 Agustus 2025 bukanlah reaksi emosional semata, melainkan ekspresi kesadaran politik yang semakin meningkat di masyarakat. Jika ketidakpuasan seluruh lapisan masyarakat ini menjadi lebih terorganisir dan konsisten, hal itu dapat mendorong perubahan besar yang lebih mendalam di luar sekadar pembatalan kebijakan tunjangan DPR, berpotensi mendorong transformasi sosial-politik yang kuat dalam lanskap demokrasi Indonesia.

Dalam kasus demonstrasi 25 Agustus 2025, teori framing memberikan pemahaman tentang bagaimana liputan media memengaruhi persepsi publik terhadap gerakan sosial ini. Seperti dijelaskan dalam teori framing yang berfungsi untuk mengidentifikasi masalah, menafsirkan penyebabnya, memberikan penilaian moral, dan mengusulkan solusi tertentu. Media utamanya menggambarkan protes tersebut sebagai respons terhadap kebijakan insentif DPR, meskipun beberapa narasi menggambarkannya sebagai ancaman terhadap ketertiban nasional. Framing semacam itu memindahkan penyebab yang dipersepsikan dari ketidaksetaraan struktural ke emosi kolektif, yang mengakibatkan penilaian negatif terhadap para demonstran. Di sisi lain, media alternatif yang tidak berada di bawah kendali pemerintah menekankan ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial sebagai masalah mendasar, sehingga turut membenarkan tindakan para demonstran. Framing yang berbeda ini menjadikan media sebagai ruang yang diperebutkan, di mana narasi negara dan masyarakat saling bertabrakan. Akibatnya, framing media tidak hanya mencerminkan peristiwa tetapi secara aktif membentuk tingkat dan arah dukungan publik terhadap gerakan tersebut.

5. KESIMPULAN

Aksi 25 Agustus 2025 merupakan contoh kuasi gerakan sosial yang bersifat top-down, di mana mobilisasi massa tidak terjadi secara spontan dan organik, melainkan dikendalikan oleh aktor elit dan narasi yang dikonstruksi melalui media sosial dan digital. Teori framing mendukung pemahaman ini, karena media tidak sekadar menyampaikan berita secara netral, tetapi juga membentuk persepsi publik dengan menonjolkan aspek tertentu dari peristiwa tersebut. Media berperan aktif dalam membingkai aksi ini sebagai

bagian dari narasi politik tertentu, sehingga menciptakan ilusi partisipasi massal yang sebenarnya dikendalikan dari atas. Dengan demikian, aksi ini mencerminkan bahwa dalam konteks era digital, kuasi gerakan sosial dipengaruhi oleh proses framing yang memperkuat narasi elit dan memobilisasi massa secara terstruktur, meskipun tampak sebagai gerakan spontan dan rakyat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, S., & Ernis, D. (2025, August 25). *Bareng warga curiga peserta demo hari ini di DPR bukan massa organik*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/bareng-warga-curiga-peserta-demo-hari-ini-di-dpr-bukan-massa-organik-2062682>
- Agustina, E., & Marlina, N. (2025). Analisis gerakan sosial buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dalam menuntut kenaikan upah minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(3), 252–265.
- Anggoro, A. P. (2025, August 27). *Apa yang sebenarnya terjadi dengan demonstrasi 25 Agustus di DPR?* Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/apa-yang-sebenarnya-terjadi-dengan-demonstrasi-25-agustus-di-dpr>
- Aswara, D., & Hamdi, I. (2025, August 25). *Demo 25 Agustus: Jurnalis Antara dipukul, aksi hingga malam hari*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/demo-25-agustus-jurnalis-antara-dipukul-aksi-hingga-malam-hari-2063013>
- Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- de Sousa, J. C. (2023). From reinvention to reproduction of civic activism: Portugal's anti-austerity social movements on Facebook. *Lua Nova: Revista de Cultura e Política*, 251–282.
- East Asia Forum Editors. (2025, September 8). *Indonesian protests a wake up call on policy complacency*. East Asia Forum. <https://eastasiaforum.org/2025/09/08/indonesian-protests-a-wake-up-call-on-policy-complacency/>
- Febriantini, K., & Anggraini, I. (2025). Gerakan sosial politik buruh: Studi tentang peranan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dalam memperjuangkan hak politik pengupahan di Kabupaten Bekasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(3), 762–781.
- Jaffrey, S. (2025, September 3). *People versus power in Indonesia*. Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/posts/2025/09/people-versus-power-in-indonesia?lang=en>
- Lubis, I. W. A., & Pandjaitan, N. K. (2024). Peran aksi kolektif untuk mitigasi bencana dalam resiliensi komunitas menghadapi tanah longsor. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)*, 8(02), 34–48.
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan kepustakaan. *ALACRITY: Journal of Education*, 1–12.
- Mardianti, D. L., & Wibowo, E. A. (2025, August 31). *Kronologi demo memprotes DPR hingga meluas berubah penjarahan*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/kronologi-demo-memprotes-dpr-hingga-meluas-berubah-penjarahan-2065182>

- Melucci, A. (1996). *Challenging codes: Collective action in the information age*. Cambridge University Press.
- Mou, X., Wei, Z., & Huang, X. (2024). Unveiling the truth and facilitating change: Towards agent-based large-scale social movement simulation. *arXiv preprint arXiv:2402.16333*.
- Mukherji, P. N. (1977). Social movement and social change: Towards a conceptual clarification and theoretical framework. *Sociological Bulletin*, 26(1), 38–59.
- Natalegawa, A. (2025, September 15). *Indonesia protests amid economic anxieties and police violence*. CSIS. <https://www.csis.org/analysis/indonesia-protests-amid-economic-anxieties-and-police-violence>
- Offe, C. (1985). New social movements: Challenging the boundaries of institutional politics. *Social Research*, 52(4), 817–868.
- Rafsanjani, S. R., Akbar, M. F., & Allifiansyah, S. (2025). Representasi fenomena FOMO: Analisis fenomenologi aksi demonstrasi 25 Agustus 2025 para ojol di TikTok. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04), 2047–2054.
- Riswanda. (2025b, October 5). *Turning protest into policy*. Inside Indonesia. <https://www.insideindonesia.org/archive/articles/turning-protest-into-policy>
- Saputra, E. Y., & Hantoro, J. (2025, August 27). *Pemerintah minta platform media sosial take down konten rekayasa AI pada demo 25 Agustus*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/pemerintah-minta-platform-media-sosial-take-down-konten-rekayasa-ai-pada-demo-25-agustus-2063489>
- Siswanti, N. (2019). Analisis framing media: Studi komparatif media online “CNN” dan “Kompas” terkait fenomena kemanusiaan di Al-Aqsa periode 20–23 Juli 2017. *Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM)*, 2(2), 110–125.
- Sulaiman, S., & Suroyo, G. (2025, August 31). *Deadly Indonesia protests force U-turn on lawmakers’ perks*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/deadly-indonesia-protests-force-u-turn-lawmakers-perks-2025-08-31/>
- Syarif, A. S., & Halida, R. (2025). Aksi kolektif pada gerakan sosial: Sebuah perspektif psikologi. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 7(1), 1–27.
- Tilly, C. (2004). *Social movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
- Touraine, A. (1988). *Return of the actor: Social theory in postindustrial society*. University of Minnesota Press.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Watif, M., JT, A. R., Tahir, L. S. A., & Hikmah, N. (2024). Ketimpangan sosial dan kemiskinan pada masyarakat perkotaan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(4), 536–547.
- Zihnioğlu, Ö., & Kourou, N. S. (2025). Unravelling anti-feminist social network in Turkey: An analysis of actors, relationships and political influence. *Mediterranean Politics*, 30(4), 848–869.